

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- AK, S. (2017). *Hukum Kontrak Internasional* (Cetakan Kelima). Rajawali Pers.
- Ali, A. (2017). *Menguak Tabir Hukum* (Cetakan Kedua). Kencana.
- Badruzaman, M. D. (2016). *Kompilasi Hukum Perikatan* (Cetakan Kedua). PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2017). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Citra Aditya Bakti.
- Hernoko, A. Y. (2019). *Hukum Perjanjian*. Prenada Media.
- HS, H. S., Abdullah, H., & Wahyuningsih, W. (2017). *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Cetakan Keempat). Bayu Media.
- Kaderi, A. (2015). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Antasari Press.
- Kusumaatmadja, M. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Binacipta.
- Martono, H. K., & Pramono, A. (2013). *Hukum Udara Perdata Internasional dan Nasional*. Rajawali Pers.
- , & Sudiro, A. (2011). *Hukum Angkatan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009 Cetakan II*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum* (Edisi Revisi). Prenada Media.

- Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (2020). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad, A. (2013). *Hukum Pengangkutan Niaga Cetakan V*. PT. Citra Aditya Bakti.
- (2017). *Hukum Perdata Indonesia (Cetakan Kelima)*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Purwosutjipto, H. M. . (2001). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*. Djambatan.
- Qomar, N. (2019). *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Sinar Grafika.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas.
- (2014). *Ilmu Hukum (Cetakan Kedelapan)*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, A. S. (2017). *Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) (Edisi Revisi)*. Bumi Aksara.
- Sasongko, W. (2007). *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. UNILA.
- Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi 2006*. Gramedia Widiasarana.
- Sidabalok, J. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan (Vol. 53)*. Nata Karya.

- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2).
- Subekti. (2014). *Aneka Perjanjian* (Cetakan Kesebelas). Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syaifuddin, M. (2012). *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dokmatik, dan Praktek Hukum*. Mandar Maju.
- Tobing, R. D. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen (Sebuah Bunga Rampai)*. LaksBang Justitia.
- Widagdo, S. (2012). *Kamus Hukum*. PT. Prestasi Pustaka.
- Wiradipraja, E. S. (2014). *Pengaturan Hukum Udara dan Ruang Angkasa*. PT. Alumni.
- Yusuf, S. (2003). *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Citra Aditya Bakti.
- (2004). *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Citra Aditya Bakti.

B. Sumber Lainnya

1. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Amandemen Keempat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

2. Jurnal

Adriani, R. (2015). Tanggungjawab Pengangkut Berdasarkan Peraturan Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara the Shipper ' S Liability Under the Regulation of the. *Lex Privatum*, 77, 299–310.

Alydrus, S., Suhadi, & Lutfitasari, R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik. *Jurnal Lex Suprema*, 2, 364.

Ashari, B. H., Wibawa, B. M., & Persada, S. F. (2017). Analisis Deskriptif dan Tabulasi Silang pada Universitas di Kota Surabaya). *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(1), 17–21.

Astri, I. G. A. A. L., & Suartha, I. D. M. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Angkutan Umum Darat. *Universitas Udayana*, 22, 1–5.

Aulia, M. Z. (2019). Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumatmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan? *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), 363–392.

Bustamar, B. (2016). Sengketa Konsumen Dan Teknis Penyelesaiannya Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(1), 35. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i1.295>

Dahlia. (2014). Peran BPSK sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun

- 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum*, 85.
- Danica, D., & Priyanto, I. M. D. (2016). Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Keterlambatan Transit Dalam Penerbangan Lanjutan. *Universitas Udayana*, 4(3), 8.
- Dewi, N. M. T. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Pesawat Udara Jika Terjadi Keterlambatan Jadwal Penerbangan Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. *Kertha Wicaksana*, 15(2), 122–129. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.122-129>
- Donald, S. (2013). *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Kargo Udara Domestik*. 1(3), 13–23.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Jurnal Humanika*, 21(1), 33–54.
- Hartana. (2016). Hukum Perjanjian. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 2(2), 10.
- Hidayat, M. T. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Udara Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penerbangan. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 8(3), 77–94. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v8i3.677>
- HSB, P. H. (2017). Pertanggungjawaban Hukum Pengangkutan Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian. *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 9(01), 151–172. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v9i01.1159>
- Imon, L. L. (2016). Prinsip Tanggung Jawab Dalam Pengangkutan Udara Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang

- Penerbangan. *Journal Scientia De Lex*, 4(1), 256–262.
- Isnaini, M., & Pranoto. (2020). Keabsahan Perjanjian Diam-Diam Dalam Perjanjian Distributor (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2178K/PDT/2008 Antara PT Dwi Damai Melawan PT Philips Indonesia). *Jurnal Privat Law*, 8(1), 104.
- Istiawati, S. (2021). Kedudukan Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Sengketa Konsumen. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 4, 210.
- Khairandy, R. (2006). Tanggung Jawab Pengangkut dan Asuransi Tanggung Jawab Sebagai Instrument Perlindungan Konsumen Angkatan Udara. *Jurnal Hukum Bisnis*, 25, 20–21.
- Lede, F. D. J. (2019). Pertanggungjawaban Atas Kerugian Yang Terjadi Dalam Pengangkutan Di Laut Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. *Lex Et Societatis*, VII(2), 86.
- Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Humanus*, 14(1), 80.
- Muthiah, A. (2016). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Journal Maranatha*, 16.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Wacana*, 13(2), 177–181.
- Panjaitan, H. (2016). Pemberlakuan Perjanjian Baku Dan Perlindungan Terhadap Konsumen. *Jurnal Hukum To-Ra*, 2.
- Pohajouw, R. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Pesawat Udara Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. *Jurnal Lex Privatum*, IV(6).

- Poluan, G. N. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Transportasi Penerbangan Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2009. *Journal Lex Et Societatis*, III(4), 75.
- Putri, R. A., & Turisno, B. E. (2015). Perlindungan Hukum Yang Adil Atas Hilangnya Bagasi Penumpang Dalam Pengangkutan Udara. *Law Reform*, 11(1), 53. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i1.15755>
- Putu Inten Kanaya, I Nyoman Putu Budiarta, & Desak Gde Dwi Arini. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Pembatalan Tiket Keberangkatan Pengangkutan Udara Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 43–48. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4636.43-48>
- Rusli, T. (2012). Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum*, 3(1), 92.
- (2015). Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum*, 10.
- Sari, M., & Asmendri. (2018). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 2(1), 15.
- See, B. R. (2020). Peranan Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat Menuju Masyarakat Indonesia Yang Sadar Hukum. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 1(1), 42–50.
- Sinilele, A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Pada Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 5(2), 199.

<https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4806>

Sugistiyoko, B. S. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Khusus Penumpang Angkutan Traspormasi Darat. *Yustitiabelen*, 2(1), 22.

Syardiansah, S. (2018). Eksplorasi Kemanfaatan Field Study Bagi Peningkatan Kompetensi Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Samudra). *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 11–20. <https://doi.org/10.33059/jseb.v9i1.457>

Tonapa, J., Handayani, P., & Artanto, T. (2021). Perlindungan Konsumen Terhadap Hilangnya Barang Bagasi Penumpang Pesawat Udara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Unrika*, 1(1), 1–16.

Utama, A. D. P., & Widiatedja, I. G. N. P. (2015). Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 4, 1–5.

Yusmar, T., & Mora, M. (2017). Perkembangan Perekonomian Wilayah dan Kargo Udara: Korelasi atau Kausalitas? *Jurnal Warta Ardhia*, 41(1).

Zamroni, M. (2019). Urgensi Pembatasan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Perspektif Historis. *Jurnal Perspektif Hukum*, 19, 284–306.

3. Lainnya

DPD. (2015). *Deskripsi* *Konsepsi*. [https://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi3/id/155#:~:text=Pasal 33 ayat \(1\) UUD, atas asas yang](https://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi3/id/155#:~:text=Pasal 33 ayat (1) UUD, atas asas yang)